

Pelatihan Manajemen UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Dusun Bencah III Pudu Permai, Kabupaten Kampar

Nunuk Suryanti^{1*}, Andri Eko Prabowo², Khulaifiyah Khulaifiyah³, Siti Maimunah⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Riau

*Corresponding author, e-mail: nunuksuryanti@edu.uir.ac.id.

Abstrak

Pelatihan manajemen UMKM bertujuan untuk membekali para pelaku UMKM agar dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dalam rangka mengatasi keterbatasan UMKM selama ini. Nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong mampu untuk mengatasi keterbatasan modal dan SDM UMKM. Peserta pelatihan diikuti oleh Ibu-Ibu Rumah Tangga Dusun Bencah III Pudu Permai yang memiliki usaha dalam skala mikro. Metode yang digunakan dengan mentoring dan consulting. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa dari 4 kompetensi yaitu memahami konsep ekonomi kerakyatan, membuat struktur organisasi beserta job description terakhir mengaplikasikan marketplace sebagai lapak penjualan sebesar 70% lebih sudah tercapai untuk setiap kategorinya.

Kata Kunci: Ekonomi kerakyatan; Manajemen UMKM; Kabupaten Kampar.

Abstract

MSME management training aims to equip MSME actors to apply the principles of populist economy to overcome the limitations that MSMEs have so far. The values of togetherness, kinship, and mutual cooperation can overcome the limited capital and human resources owned by MSMEs. The training participants were housewives in Dusun Bencah III Pudu Permai who have micro-scale businesses. The method used was mentoring and consultation. The results of the training showed that of the 4 competencies, namely understanding the concept of populist economy, creating an organizational structure along with job descriptions, and finally applying the marketplace as a sales stall, more than 70% had been achieved for each category.

Keywords: Kampar ragency; Populist economy; UMKM Mannagement.

How to Cite: Suryanti, N. et al. (2024). Pelatihan Manajemen UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Dusun Bencah III Pudu Permai, Kabupaten Kampar. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 241-248.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Jumlah UMKM di Indonesia 99, 8% dari total bisnis di Indonesia, tetapi hanya menyumbang antara 58 hingga 61% dari produk domestik bruto (Tambunan, 2019). Hambatan yang dihadapi UMKM antara lain minimnya pengetahuan tentang teknologi, pemasaran, ketidakmampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan (International Labour Office, 2019). Menurut Midgley (2008); Das & Mohiuddin, (2015); Raghuvanshi et al., (2017) hambatan yang paling utama selain pemasaran adalah masih kesulitan untuk akses pinjaman ke bank.

Upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut melalui penerbitan sejumlah regulasi yang memfasilitasi bidang pemasaran, pengadaan bahan baku, serta pendanaan dengan meluncurkan skema kredit tanpa agunan pada tahun 2007 yang dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Tambunan, 2017). Jaringan dan kolaborasi juga menjadi faktor penting untuk mengatasi hal tersebut. Adanya kolaborasi baik antar pelaku UMKM, *startup*, akademisi, dan perusahaan besar maupun stakeholder lainnya, dapat memberikan manfaat dalam berinovasi ditengah persaingan yang tinggi (Widjajanti, 2015); (Muscio, 2007); (Zeng et al., 2010); (Mercandetti et al., 2017); (Ketchen et al., 2007). Kolaborasi ini akan mendulang sukses tatkala ada usaha untuk membangun kepercayaan dan tujuan bersama (Rothkege et al., 2006).

Salah satu cara untuk meningkatkan kolaborasi dengan membantu membuka atau mempermudah jaringan antar perusahaan dengan UMKM (Rosenfeld, 1996), termasuk dalam bentuk kolaborasi virtual (Fachrunnisa et al., 2012), walaupun hasilnya masih belum maksimal. Menganalisa lebih dalam seputar pengembangan UMKM, sektor pembelajaran masih belum disentuh secara mendalam. Menurut (Saunders et al., 2014) inovasi dan orientasi pembelajaran merupakan faktor kunci dalam keberhasilan UKM. Keberhasilan yang memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan kemakmuran ekonomi (Holmes et al., 2010).

Pengetahuan berkembang sangat cepat, sehingga cepat usang kemudian digantikan dengan pengetahuan yang baru. Penyesuaian diperlukan dengan memperbaharui pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki (Popescu, 2012). Memperbaharui pengetahuan dalam sebuah organisasi bisnis diperlukan dalam menghadapi persaingan global. Dibandingkan dengan kepemilikan akan tanah dan akses ke modal besarnya pengetahuan merupakan sumber daya yang lebih utama dalam persaingan (Dunford, 2000). Kemampuan perusahaan untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan menjadi faktor penting untuk bertahan (Bosch et al., 2005), (Leiponen, 2006). Pertukaran pengetahuan dan pengembangan sistem manajemen pengetahuan secara kolektif meningkatkan organisasi pembelajaran dan akhirnya akan mengarah pada inovasi dan imitasi kreatif (Kim & Lee, 2006).

Desa Bencah III Pudu Permai sebagian besar penduduknya bekerja disektor UMKM. Dari pengamatan menjelaskan bahwa sebagian besar para Ibu Rumah tangga, memiliki usaha mikro yang belum dikelola secara rapi. Hal ini dikarenakan kurang keterampilan dalam mengelola usaha kecil, termasuk manajemen keuangan, marketing, maupun produksi, serta keterbatasan SDM dan modal.

Berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan, menurut Prof. Dr. Mubyarto Ekonomi kerakyatan merupakan sistem yang berdasarkan kekeluargaan, kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat kedalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jejaring pasar domestik dan pelaku usaha masyarakat (Soekarno, 1930). Maka dari itu melalui jaringan bersama dan usaha bersama diharapkan dapat menutup kekurangan UMKM yang selama ini belum terpecahkan.

Penelitian yang pernah dilakukan terkait hal ini adalah ekonomi kerakyatan digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan industri kreatif dimana sektor yang diandalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Taqiuddin & Yakub, 2021). Hal ini dikarenakan masyarakat desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan serta kurangnya perolehan informasi tentang pembentukan BUM Desa (Purnamasari et al., 2016). Menyadari kelemahan yang dihadapi UMKM seperti keterbatasan modal dan sumber daya manusia, sistem ekonomi kerakyatan menjadi logis untuk memecahkan masalah ini. Mengangkat nilai-nilai gotong royong dalam berekonomi memberikan peluang pengusaha mikro dapat bertahan ditengah persaingan yang tinggi pada zaman teknologi seperti saat ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat berkembang melalui kebijakan pemerintah yang memihak pada pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan potensi kewirausahaan dengan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usaha, dengan semangat dan akses informasi untuk penguasaan informasi pasar di daerah yang memadai (Ahmadun, 2015). Transparansi dibutuhkan ketika melakukan manajemen usaha dengan ekonomi kerakyatan harapannya dapat menghindari konflik dikemudian hari (Purnamasari et al., 2016). UMKM yang berperan sebagai tumpuan ekonomi kerakyatan dapat menciptakan ekonomi berbasis digital dalam penerapannya. Peran UMKM sebagai ekonomi kerakyatan dapat menjadi andalan masyarakat dalam kondisi pandemi.

UMKM yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 menggunakan pemasaran online (digital marketing) untuk meningkatkan penjualan di masa pandemi COVID-19 (Nata & Haryono, 2022). Pengembangan UMKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha, perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat usaha kecil dan menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung (Retnowati et al., 2018). Hal ini dikarenakan Ekonomi kerakyatan dengan mengacu pada UUD 1945, beserta penjelasannya sebagai demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua pihak, untuk semua, dibawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Maka dari itu, Swasono (1999) memberikan gambaran bahwa ekonomi kerakyatan pada hakekatnya harus mendukung kehidupan rakyat seluruhnya dan sekaligus mendukung kehidupan perekonomian nasional. Hal ini terlihat bahwa Masyarakat dusun bencah III Pudu Permai masih kesulitan dalam mengembangkan usahanya dimana rata-rata memiliki keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Melalui sistem ekonomi kerakyatan, dengan mengangkat nilai-nilai gotong royong diharapkan dapat mengatasi masalah bersama. Berdasarkan Paparan tersebut, akan dilakukan pengembangan UMKM tingkat RT berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan dengan mengangkat judul Pelatihan Manajemen UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Dusun Bencah III Pudu Permai, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Metode Pelaksanaan

Metode yang dipilih dalam melakukan pelatihan dan pendampingan pelaku UMKM adalah *mentoring* dan *consulting*. *Mentoring* merupakan praktik yang dilakukan dalam memberikan nasehat kepada orang yang belum mempunyai pengalaman agar mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan. Dari kegiatan mentoring ini akan terjadi konsultasi diantara mentor dengan mentee secara lebih detail. Konsultan disini merupakan ahli atau praktisi dalam bidang manajemen usaha UMKM. Sedangkan menteenya adalah Warga Rt 001 Dusun Bencah Pudu Permai.

Prosedur pendampingan terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Perencanaan, dalam kegiatan perencanaan akan dilakukan diskusi dengan ketua Rt 001 terkait dengan waktu pelaksanaan terkait dengan jumlah jam per minggu setiap pendampingan dan terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Ketika pelatihan berlangsung.
2. Pelaksanaan, pelaksanaan dilakukan setelah jadwal sudah disusun bersama. Mentor berasal dari akademisi dalam pembuatan manajemen UMKM

Monitoring dan Evaluasi, Monev dilakukan setiap satu bulan sekali dan akhir periode pendampingan. Monev yang dilakukan pada akhir bulan mengevaluasi terkait dengan apakah program pelatihan dan pendampingan sudah sesuai dengan perencanaan dan tujuan diharapkan. Sedangkan monev pada akhir pendampingan melihat sejauh mana kompetensi warga RT 001 dapat diamati dan seberapa besar kompetensi tersebut berhasil diterapkan.

Hasil dan Pembahasan

Pelatihan manajemen UMKM berbasis ekonomi kerakyatan di Dusun Bencah III Pudu Permai dilakukan pada tanggal 23 September 2023. Peserta pelatihan terdiri dari 16 Ibu-Ibu Rumah Tangga. Pelatihan diawali dengan penanaman konsep Manajemen secara Umum kemudian mengenalkan konsep UMKM berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2008, selanjutnya memasuki bagian inti adalah proses manajemen Usaha Kecil. Pemaparan materi dan pelatihan pada tahap awal berdurasi 120 menit.

SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

Badan usaha dengan asas kekeluargaan

Model perekonomian yang humanistik dengan kesejahteraan rakyat sebagai dasarnya.

Pembangunan ekonomi dengan dasar kemanusiaan. Dengan demikian, monopoli, persaingan bebas, dan segala bentuk penindasan antarmanusia dapat dihindarkan.

Tujuan utama yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 1. Materi Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Pelatihan Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam usaha kecil disimulasikan dengan dengan pembentukan kelompok usaha dimana anggotanya terdiri dari Ibu-ibu rumah tangga yang memiliki jenis usaha yang sama namun berbeda bentuk. Misalnya pada kelompok ibu-ibu usaha kuliner, digabungkan untuk produk kue, makanan berat seperti nasi kuning, nasi uduk, lontong, dengan produk snack dan dessert. Anggota kelompok tersebut melakukan kerjasama dalam bentuk pemasaran bersama. Untuk selanjutnya akan di bentuk *job description* masing-masing anggota.

Prinsip dasar Ekonomi Kerakyatan (Pasal 33 UUD 1945)

Pasal 33 Ayat 1, "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.*"

Pasal 33 Ayat 2, "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*"

Pasal 33 Ayat 3, "*Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*"

Gambar 2. Materi Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan

Pada penerapan prinsip dasar ekonomi kerakyatan pengenalan nilai-nilai kerjasama, gotong royong, dan kekeluargaan ditekankan melalui wacana pendirian usaha bersama tingkat Rukun Tetangga atau BUMRT. Antusiasme peserta terlihat dari minat peserta pada saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar proses pelaksanaan kerjasama usaha.

MANAJEMEN USAHA KECIL

Ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil adalah

"*entrepreneurship, professional, inovatif, keluasaan jaringan usaha dan kemampuan adaptif*"

Gambar 3. Materi Manajemen Usaha Kecil

Manajemen Usaha Kecil pada kelompok UMKM dusun bencah III pudu permai diawali dengan pendampingan *Planning* usaha. Penentuan nama usaha dan produk-produk unggulan usaha ditetapkan secara musyawarah. Berlanjut kepada pembentukan struktur organisasi dengan pembagian kerja masing-masing anggota. Struktur organisasi terdiri dari manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer penjualan.

Pembagian tugas antara lain Manajer produksi: (1) Merencanakan dan menyusun jadwal produksi. (2) Memastikan stok bahan baku memadai. (3) Mengembangkan dan menerapkan metode produksi dan mengoptimalkan peralatan untuk meningkatkan produktivitas. (4) Mengawasi proses produksi sesuai standar kualitas dan biaya. Manajer pemasaran: (1) Memimpin inisiasi promosi produk, (2) Menentukan strategi pemasaran, (3) Mengatur anggaran pemasaran, (4) Inisiasi inovasi marketing. Manajer Penjualan: (1) Menangani keluhan pengguna, (2) Melakukan monitoring pelanggan, (3) Menentukan keuntungan produk, (4) Menentukan jadwal promosi.

Terkait kegiatan lain dilakukan secara musyawarah mufakat. Pembagian kerja dilakukan untuk memberi rasa tanggung jawab sesuai dengan tugasnya, namun demikian sistem gotong royong tetap diutamakan jika ada anggota yang memerlukan bantuan terkait dengan tugasnya. Evaluasi dan monitoring dilakukan setiap ada satu bulan sekali.

MODEL MANAJEMEN UMKM BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN



Gambar 4. Model Manajemen Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan alur kegiatan yang menggunakan prinsip-prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, maka model pengembangan manajemen UMKM berdasarkan system ekonomi kerakyatan dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 5. Pelatihan Manajemen UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Dari hasil pemantauan selama 4 bulan, Tabel 1 menampilkan ketercapaian kompetensi selama kegiatan pelatihan.

Tabel 1. Tingkat Ketercapaian Kompetensi UMKM

Bulan ke	Tanggal	Pelatihan untuk kompetensi	*Tingkat ketercapaian kompetensi	Keterangan
1	23 Oktober 2023	Pemahaman konsep ekonomi kerakyatan	75%	Dari 4 Kelompok, satu kelompok yang belum paham
2	23 November 2023	Membuat struktur organisasi	80%	Musyawaharah belum mencapai hasil final
3	23 Desember 2023	Penentuan Job Description	75%	Masih ada job description yang masih tumpang tindih antar anggota
4	23 Januari 2024	Mengenal marketplace	100%	Shopee

Berdasarkan tabel 1 kompetensi mengenal marketplace mencapai 100%. Ternyata ibu-ibu rumah tangga dusun bench III pudu permai sudah mengenal aplikasi shopee. Oleh karena itu cukup cepat untuk mengenalkan aplikasi tersebut dengan tujuan untuk penjualan produk. Penentuan akan pembagian tugas masing-masing anggota masih mencapai 75% hal ini karena ada beberapa anggota kelompok yang memiliki skill dalam bidang yang sama, sehingga ada bidang lain yang masih kosong. Bagian marketing masih kosong, karena ibu-ibu masih belum mampu melakukan marketing secara online. Maka untuk program selanjutnya akan difokuskan untuk bidang digital marketing.

Kekurangan-kekurangan dalam pemahaman konsep ekonomi kerakyatan, kemudian belum selesainya job description yang sesuai dengan keahlian masing-masing anggota, yang berdampak pada belum selesainya pembuatan struktur organisasi 100%. Maka dalam beberapa minggu setelah pelatihan akan dilakukan pendampingan dalam bentuk *consulting* sesuai dengan kebutuhan dengan waktu dan cara yang lebih fleksibel tanpa mengganggu proses produksi masing-masing pelaku UMKM. Melalui penerapan konsep ekonomi kerakyatan, harapannya nilai-nilai gotong royong dalam kebersamaan yang berasaskan kekeluargaan dapat saling menguatkan dan dapat menjadi solusi masalah bersama.

Menurut Swasono (2015) keuntungan yang bisa diambil ketika para pelaku UMKM dengan kebersamaan untuk saling bekerjasama, tolong menolong dan bergotong royong akan menghasilkan produktifitas sinergik yang berganda. Artinya peluang untuk tergusur dengan pemodal besar akan berkurang. Oleh karena itu wadah ekonomi rakyat yang paling tepat adalah koperasi (Swasono, 2015). Nilai gotong royong, dimana mengandung makna sebagai sebuah faham yang dinamis, yang menggambarkan usaha bersama, suatu perbuatan karya bersama, dan suatu perjuangan saling membantu, mengandung sebuah prinsip kebersamaan, jerih payah bersama untuk kepentingan dan kebahagiaan bersama. Berazaskan kesadaran bekerja baik secara rohani maupun jasmani, dalam mengupayakan karya bersama. Mengandung keinsyafan, kesadaran dan sikap jiwa untuk menempatkan serta menghormati kerja sebagai kelengkapan dan perhiasan kehidupan (Effendi, 2013). Menjunjung semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi dan kepercayaan (Soekarno, 1961).

Mencermati prinsip yang terkandung dalam nilai gotong royong melekat aspek-aspek yang terkandung dalam modal sosial (Effendi, 2013). Modal sosial mempunyai peran terhadap keberlanjutan usaha terbukti pada komunitas pengusaha keramik dinoyo (Wibowo, 2016) dan pengembangan UMKM di kota Ambon (Effendy, 2018). Harapan dari kegiatan pelatihan ini adalah kemandirian UMKM untuk terus berkelanjutan, sehingga diperlukan pemberdayaan berbasis ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan juga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian, dapat disimpulkan bahwa melalui metode *Participatory Rural Appraisal* (PAR), kelembagaan BUMDes Desa Buluhnaman berhasil ditingkatkan dalam tata kelola dan manajemen. Para stakeholder BUMDes, termasuk Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pengurus BUMDes, serta perwakilan masyarakat, berhasil meningkatkan kapasitas mereka dalam merencanakan unit usaha, membuat dokumen persyaratan pembentukan BUMDes berbadan hukum, dan melakukan penataan administrasi kelembagaan. Selain itu, pengambilan keputusan melalui musyawarah desa juga telah dilakukan secara efektif. Tim pengabdian menyarankan kepada Pengelola BUMDes, agar dapat mengelola BUMDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Pengelolaan BUMDes. Memanfaatkan dana desa (DD), bantuan keuangan provinsi secara efektif dalam mendukung pengembangan usaha BUMDes, menggali potensi desa untuk pengembangan unit usaha dengan melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu, melakukan kerjasama/kolaborasi antar BUMDes untuk memperluas pasar BUMDes. Peserta kegiatan pelatihan BUMDes sangat antusias untuk mengembangkan BUMDes di di Desa Buluhnaman, sehingga mengharapkan mendapatkan pendampingan lebih lanjut dari Tim PKM Perguruan Tinggi, maka diharapkan adanya keberlanjutan kegiatan pengabdian dengan tema-tema lain yang dibutuhkan oleh pengelola BUMDes.

Daftar Pustaka

- Ahmadun, A. (2015). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 5(1), 250–256.
- Bosch, F. A. J., Baaij, M. G., & Volberda, H. W. (2005). How knowledge accumulation has changed strategy consulting: strategic options for established strategy consulting firms. *Strategic Change (Wiley InterScience)*, 34(1), 25–34. <https://doi.org/10.1002/jsc.705>
- Das, S., & Mohiuddin, K. M. (2015). Motivational Factors and the Constraints of Women Entrepreneurship Development in Bangladesh. *International Journal of Information, Business and Management*, 7(3), 377–395.

- Dunford, R. (2000). Key challenges in the search for the effective management of knowledge in management consulting firms. *Journal of Knowledge Management*, 4(4), 295–302. <https://doi.org/10.1108/13673270010379849>
- Effendi, T. N. (2013). Budaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23403>
- Effendy, J. 2018. Peran Modal Sosial Sebagai Upaya Pengembangan UMKM di Desa Batu Merah Kota Ambon. *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*. 12(2), 103-108.
- Fachrunnisa, O., Mutamimah, & Gunawan. (2012). A Framework of Digital Collaboration Networks for SME 's Sustainability. *IPEDR*, 52(5), 20–25. <https://doi.org/10.7763/IPEDR>.
- Holmes, P., Hunt, A., & Stone, I. (2010). An analysis of new firm survival using a hazard function. *Applied Economics*, 42(2), 185–195. <https://doi.org/10.1080/00036840701579234>
- International Labour Office. (2019). *Financing Small Businesses in Indonesia Challenges and Opportunities*. ILO.
- Ketchen, D. J., Ireland, R. D., & Snow, C. C. (2007). Strategic Entrepreneurship, Collaborative Innovation, And Wealth Creation. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 306(1), 371–385. <https://doi.org/10.1002/sej>
- Kim, S., & Lee, H. (2006). The Impact of Organizational Context and Information Technology on Employee Knowledge-Sharing Capabilities. *Public Administration Review*, 2(1), 370–385).
- Leiponen, A. (2006). Managing Knowledge for Innovation: The Case of Business-to-Business Services. *Product Innovation Management*, 23, 238–258.
- Mercandetti, F., Larbig, C., Tuozzo, V., & Steiner, T. (2017). Innovation by Collaboration between Startups and SMEs in Switzerland. *Technology Innovation Management Review*, 7(12), 23–32.
- Midgley, J. (2008). Microenterprise, global poverty and social development. *International Social Work*, 51(4), 467–479. <https://doi.org/10.1177/0020872808090240>
- Muscio, A. (2007). The Impact of Absorptive Capacity on SMES' Collaboration. *Econ. Innov. New Techn*, 16(8), 653–668. <https://doi.org/10.1080/10438590600983994>
- Nata, M. A. D., & Haryono, H. (2022). Implementasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Digital untuk Membangkitkan UMKM pada Masa Pandemi Covid 19. *Promosi: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 10(1).
- Popescu, A. I. (2012). Lifelong Learning in the Knowledge Economy : Considerations on the Lifelong Learning System in Romania from a European Perspective. *Revista De Cercetare Si Interventie Sociala*, 37, 49–76.
- Purnamasari, H., Yulyana, E., & Ramdani, R. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang*. 1(2), 31–42.
- Raghuvanshi, J., Agrawal, R., & Ghosh, P. K. (2017). Analysis of Barriers to Women Entrepreneurship: The DEMATEL Approach. *Journal of Entrepreneurship*, 26(2), 220–238. <https://doi.org/10.1177/0971355717708848>
- Retnowati, T., Boediningsih, W., & Afdol. (2018). Kebijakan Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat III, September*, 316–322.
- Rosenfeld, S. A. (1996). Does cooperation enhance competitiveness? Assessing the impacts of inter-firm collaboration. *Research Policy*, 25(1), 247–263.
- Rothkege, S., Erakovic, L., & Deborah, S. (2006). Strategic Alliances between SMEs and Large Firms: An Exploration of the Dynamic Process. *Management Revue*, 17(1), 50–71.
- Saunders, M. N. K., Gray, D. E., & Goregaokar, H. (2014). SME innovation and learning: The role of networks and crisis events. *European Journal of Training and Development*, 38(1–2), 136–149. <https://doi.org/10.1108/EJTD-07-2013-0073>
- Sulistyo, S. (2010). Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 6(1), 58–73.
- Swasono, S., E. (2015). *Keindonesiaan Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan, dan Kemandirian*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Tambunan, T. (2017). MSMEs and access to financing in a developing economy: The Indonesian experience. *Financial Entrepreneurship for Economic Growth in Emerging Nations*, 3(2), 148–172). <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2700-8.ch008>
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(18), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Taqiuddin, H. U., & Yakub, M. (2021). Strategi Pengembangan Desa Wisata Sebagai Pembangkit Ekonomi Kerakyatan (Studi di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah). *Ijert*, 1(2), 16–28.

-
- Wibowo, R., H. 2016. Identifikasi Peran Modal Sosial Terhadap Keberlanjutan Usaha (Studi Kasus UMKM Keramik Dinoyo, Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Widjajanti, K. (2015). Marketing Collaboration and SME Strategy Implementation in Blora , Indonesia. *Asean Marketing Journal*, 7(1), 28–39.
- Zeng, S. X., Xie, X. M., & Tam, C. M. (2010). Technovation Relationship between cooperation networks and innovation performance of SMEs. *Technovation*, 30(3), 181–194. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2009.08.003>